

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 248-255
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12553419>

Esensi Penguatan Etika Politik Islam di Indonesia

Khoirun Nisya¹, Nur Aulia Nasrung², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200122016@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Esensi penguatan etika politik Islam di Indonesia yang menggarisbawahi perlunya keselarasan antara prinsip agama dan tata kelola politik. Hal ini membutuhkan integritas, transparansi, dan keadilan sebagai landasan bagi pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan politik berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memberi kontribusi akademis terkait pandangan moral bagi para pemimpin politik dan masyarakat umum yang nantinya akan memberikan pemahaman terkait esensi dan penguatan etika dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik politik di Indonesia yang dapat membentuk kebijakan politik yang lebih baik menciptakan system politik yang adil, transparan dan berkeadilan social. Sistem pemimpin pada umumnya tidak menerangkan peran politik dan partisipasi masyarakat, hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji esensi dan penguatan etika politik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-interpretatif dengan melakukan studi literatur dari salah satu sumber. Kemudian data yang diperoleh akan dikumpulkan, dipelajari, dan disintesis untuk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Kata Kunci: *Esensi, Etika Politik Islam, Penguatan Etika Politik.*

Abstract

The essence of strengthening Islamic political ethics in Indonesia which underlines the need for harmony between religious principles and political governance. This requires integrity, transparency and justice as the basis for leaders and society in carrying out politics based on Islamic values. The theoretical aim of this research is to provide an academic contribution related to moral guidance for political leaders and the general public which will later provide an understanding regarding the essence and strengthening of ethics by integrating Islamic values into political practice in Indonesia which can form better political policies. a political system that is fair, transparent and socially just. The leadership system generally does not explain the role of politics and community participation, this is what encourages researchers to examine the essence and strengthening of Islamic political ethics. The research method used is a qualitative-interpretive method by conducting a literature study from one source. Then the data obtained will be collected, studied and synthesized and then analyzed carefully to get answers to the problems posed.

Keywords: *Essence, Islamic Political Ethics, Strengthening Political Ethics.*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Etika politik Islam merupakan salah satu aspek krusial (gawat, genting) dalam kehidupan di Indonesia. Karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam konteks ini, etika politik Islam tidak hanya mencakup aspek moralitas individu dalam berpolitik tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, penerapan nilai-nilai ini dalam praktek politik sering kali menemui hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, penguatan etika politik dalam politik Islam menjadi sangat penting untuk dibahas.

Data menunjukkan bahwa sejak masa kemerdekaan Indonesia, politik Islam telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam dinamika politik negara ini. Gerakan politik Islam telah berperan dalam memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kebebasan beragama. Indonesia termasuk negara populasi muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020, sekitar 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, pemahaman dan

penerapan dalam penguatan etika politik Islam memiliki potensi besar untuk membentuk sistem politik yang lebih baik bagi politik dan masyarakat di Indonesia.¹

Pandangan para pakar dalam bidang politik dan agama memiliki pandangan yang beragam terkait isu ini. Sebagian para pendukung meyakini bahwa mengimplementasikan etika politik Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun system politik yang lebih adil dan berprinsip. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam politik akan tercipta politik yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada kepentingan umum. Namun, ada juga yang menentang, mengkhawatirkan polarisasi dan konflik yang dapat terjadi jika nilai-nilai Islam dijadikan basis Tunggul dalam politik.¹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan moral bagi para pemimpin politik dan masyarakat umum bahkan dijumpai mahasiswa yang nantinya akan memberikan pemahaman terkait esensi dan penguatan etika dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik politik di Indonesia yang dapat membentuk kebijakan politik yang lebih baik dan menciptakan system politik yang adil, transparan dan berkeadilan social.

Dalam penelitian sebelumnya lebih terfokus pada aspek teoritis etika politik Islam yang mengarah ke pemimpin politik saja, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana peran politik lainnya dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan etika politik Islam dengan benar di kehidupan berpolitik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi gap tersebut dengan memberikan penguatan etika politik Islam dalam berpolitik seperti peran lembaga, tokoh-tokoh, dan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan yang berharga dalam mengambil keputusan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Dengan demikian, penting untuk mengakui dan memperkuat peran etika politik sebagai bagian integral dari pembangunan politik yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal yang diperoleh melalui google scholar, kemudian dikelola dengan kata-kata deskriptif. Peneliti menjelaskan metode yang akan di gunakan terkait esensi penguatan etika politik islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penulisan *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan mengidentifikasi dan mencermati data yang terdapat dalam kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti analisis jurnal, buku dan website di internet, serta prosedur analisis data yang akan diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Etika Politik dalam Islam

Esensi etika politik dalam Islam membahas tentang prinsip-prinsip moral dan normatif yang menjadi landasan bagi praktik politik dalam konteks ajaran Islam.² Ini melibatkan pengamalan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan pertimbangan moral lainnya dalam setiap aspek kegiatan politik. Dalam Islam, politik bukan hanya sekadar urusan kekuasaan atau pembagian kepentingan, tetapi juga merupakan bagian integral dari tata kehidupan yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika.¹ Tentunya esensi penguatan politik Islam ini menjadi akar dari segala akar dalam menopang nilai-nilai moral, dan menjadikan dasar utama dalam pembangunan kepemimpinan yang baik.

Prinsip-prinsip etika politik dalam Islam

Prinsip-prinsip etika politik dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu prinsip utama adalah keadilan. Keadilan dalam politik Islam menekankan perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua individu dan kelompok dalam masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Keadilan ini mencakup distribusi sumber daya, perlakuan di hadapan hukum, dan kebijakan publik. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8:

¹ Dwi Hartini, "Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah," *Asketik* 3, no. 1 (2019): 47–59, <https://doi.org/10.30762/ask.v3i1.1157>.

² Adam Malik, Abdur Rahim, and Taufiqurachman Taufiqurachman, "Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun Dalam Implementasinya Di Indonesia," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 3599–3610, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 ۝۸ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Al-Maidah: 8).³

Dari ayat tersebut berbanding lurus dengan prinsip-prinsip etika politik Islam yang didasari dengan sikap keadilan. Transparansi juga menjadi aspek penting dalam etika politik Islam. Transparansi menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan politik, penyampaian informasi kepada publik, serta akuntabilitas atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin politik. Dalam konteks ini, pemimpin diharapkan untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan dan kebijakan. Selain itu, akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam etika politik Islam. Pemimpin perlu bersiap untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusan yang mereka buat, baik itu dalam ranah publik atau ketika dihadapkan pada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan pada masa akhirat.¹ Kejujuran adalah nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam dan juga penting dalam praktik politik. Kejujuran dalam berbicara dan bertindak menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap para pemimpin politik. Dalam Islam, kejujuran dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh semua individu, termasuk mereka yang berkecimpung dalam politik.⁴ Sikap jujur menjadi pondasi utama dalam bersikap karena hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menempatkan kepercayaan sesama manusia.

Implementasi etika politik dalam praktek

Implementasi etika politik dalam praktek politik Islam di Indonesia melibatkan berbagai aspek, mulai dari perilaku individu hingga kebijakan publik. Pemimpin politik dan aktivis Islam diharapkan untuk menjadi contoh yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip etika politik dalam setiap langkah mereka. Mereka diharapkan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, partai politik Islam juga memiliki peran penting dalam mendorong praktik politik yang berkualitas. Partai politik harus mengintegrasikan prinsip-prinsip etika politik dalam program dan kegiatan mereka. Mereka harus memiliki mekanisme internal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta penerapan kebijakan.¹

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendorong kepatuhan terhadap etika politik Islam. Masyarakat harus kritis terhadap perilaku politik para pemimpin dan partai politik. Masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam menilai kinerja politik para pemimpin mereka.⁵ Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak kepada Tuhan dan bersikap adil kepada manusia.¹

Tantangan dan hambatan dalam etika politik Islam

Meskipun pentingnya etika politik dalam Islam diakui secara luas, ada beberapa tantangan dan hambatan dalam mewujudkannya dalam praktek politik di Indonesia. Salah satunya adalah pragmatisme politik yang sering mengalahkan nilai-nilai moral dan etika. Para pemimpin politik sering kali terjebak dalam pertimbangan kepentingan politik yang sempit, yang mengorbankan prinsip-prinsip etika politik.⁶ Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan ajaran Islam yang mencakup etika politik juga menjadi tantangan dan menjadi ketik-tahuan bagi kalangan khalayak banyak.

Banyak dijumpai pemimpin politik dan aktivis Islam yang kurang memahami ajaran agama mereka dengan mendalam atau bahkan menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika politik.¹ Kemudian, adanya konflik

³ M Thahir Maloko, “Etika Politik Dalam Islam,” *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 50–59.

⁴ Prihatin Dwi Santoro, “Etika dan kejujuran dalam berpolitik”: Prihatin Dwi Santoro,” *Politika* 4, no. 2 (2013): 13–21.

⁵ Maria Putri et al., “Perilaku Yang Buruk Dalam Etika Berpolitik (Gratifikasi),” *Administrasi Publik: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, no. June (2023).

⁶ Linda Darmila, Julia Ivanna, and Muhammad Iqbal, “Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 8, no. 2 (2019): 59–71, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2606>.

kepentingan antara politik dan agama juga menjadi hambatan dalam penguatan etika politik dalam Islam yang mestinya diwaspadai. Terkadang, politik dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan agama tertentu, yang kemudian dapat mengabaikan prinsip-prinsip etika politik.⁷ Melihat dari beberapa hambatan mestinya tokoh-tokoh dalam menjalankan politik tersebut harus lebih mengedepankan nilai-nilai agama terutama agama Islam.

Penguatan Etika Politik Islam di Indonesia

Penguatan etika politik Islam merujuk pada upaya meningkatkan penerapan nilai-nilai moral Islam dalam praktek politik. Penguatan etika politik Islam di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan mendesak karena mengingat peran yang penting dari politik dalam kehidupan masyarakat. Meskipun politik Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan besar sejak kemerdekaan, negara ini juga terlibat dalam perselisihan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan etika politik Islam sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip moralitas dan keadilan Islam.¹ Setelah terumuskan dari narasi penguatan etika politik Islam di Indonesia dibutuhkan beberapa peranan dari berbagai kalangan, berikut beberapa peranan yang termuat dalam konteks etika politik Islam.

Peran Lembaga politik Islam dalam penguatan etika politik

Peran lembaga politik Islam dalam penguatan etika politik di Indonesia memiliki implikasi yang sangat penting dalam dinamika politik negara Indonesia. Lembaga-lembaga politik Islam, baik dalam bentuk partai politik maupun organisasi Islam yang terlibat dalam politik, memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk tatanan politik yang lebih bermoral dan beretika di Indonesia. Partai politik Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memperkuat etika politik Islam. Sebagai perwakilan dari aspirasi umat Islam, partai-partai politik Islam harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam politik. Partai politik Islam harus memastikan bahwa kegiatan politik yang mereka lakukan tidak hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan semata, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan negara sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Transparansi merupakan aspek penting dalam penguatan etika politik oleh lembaga politik Islam. Partai politik Islam harus menjalankan proses politiknya secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi setiap langkah yang mereka ambil. Selain itu, akuntabilitas juga harus ditekankan oleh lembaga politik Islam. Partai politik Islam harus siap untuk bertanggung jawab atas segala janji politik yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Hal ini meliputi penegakan disiplin internal terhadap anggota partai yang terlibat dalam praktek politik yang tidak bermoral serta siap menerima kritik dan saran konstruktif dari masyarakat.¹

Selain itu, prinsip kejujuran harus menjadi pondasi utama dalam aktivitas politik partai politik Islam. Kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan kampanye politik, serta berinteraksi dengan pihak lain menjadi penting dalam membangun reputasi partai politik Islam sebagai agen perubahan yang berkualitas dan berintegritas. Peran lembaga politik Islam juga mencakup memperjuangkan agenda politik yang berpihak pada kepentingan umat dan negara. Mereka harus aktif dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, perlindungan hak-hak rakyat, dan pembangunan yang berkelanjutan.⁹

Peran tokoh politik Islam dalam penguatan etika politik

Para tokoh politik Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan etika politik di Indonesia. Tokoh politik Islam bukan hanya sekadar pemimpin politik, tetapi juga menjadi figur yang dihormati dan diikuti oleh para pengikutnya. Dengan demikian, perilaku dan praktek politik yang mereka tunjukkan dapat memiliki dampak yang besar terhadap moralitas politik secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa tokoh politik Islam harus menjadi teladan dalam praktek politik mereka.

Mereka harus menunjukkan integritas yang tinggi, kejujuran, dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip moral Islam. Berarti mereka harus berusaha untuk menghindari segala bentuk perilaku politik yang korup, manipulatif, atau tidak bermoral. Sebagai pemimpin, mereka memiliki

⁷ Muh. In'Amuzzahidin et al., "Etika Politik Dalam Islam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2012): 34–55, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>.

⁸ Masykuri Abdillah, "Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era informasi.," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 247–58, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/937/823>.

⁹ Fauzan A L I Rasyid, "Politik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 9, no. 2 (2008): 75–86.

tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kepentingan umat diutamakan dan bahwa segala tindakan yang mereka lakukan selaras dengan nilai-nilai Islam yang luhur.¹ Tokoh politik Islam juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran etika politik Islam di kalangan masyarakat. Mereka memiliki platform yang luas untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan keadilan kepada para pengikutnya dan masyarakat lainnya (bukan pengikutnya). Dengan menggunakan kekuatan pengaruh mereka, mereka dapat membantu mengubah paradigma politik di masyarakat, dari sekadar mengejar kekuasaan menjadi menegakkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam setiap langkah politik yang diambil.¹⁰

Salah satu tokoh Al-Mawardi menyatakan bahwa unsur pertama untuk menjadi kepala negara harus memenuhi syarat adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki pengetahuan yang luas, dan bijak. Sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara, serta bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang lebih pantas dan terhitung akan kejujurannya dalam memimpin umat Islam. Namun, siapa yang berhak menjadi anggota ahl al-ikhtiyâr (orang yang memiliki wewenang untuk memilih kepala negara).¹

Tokoh politik Islam juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan melatih generasi penerus dalam politik. Tokoh politik harus berperan sebagai mentor dan pembimbing bagi para pemuda yang ingin terlibat dalam politik, mengajarkan mereka nilai-nilai moral dan etika politik yang benar. Dengan membentuk pemimpin politik masa depan yang berkualitas dan bermoral, mereka dapat membantu memastikan bahwa tradisi politik yang baik dapat terus dilanjutkan dari generasi ke generasi.¹¹

Oleh karena itu, tokoh politik Islam juga harus bersikap responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan umat karena nantinya tokoh yang menjadi mentor ini akan menjadi pelaku atau pelaksana dari apa yang sudah mereka bentuk. Mereka harus menjadi perwakilan yang setia bagi kepentingan rakyat, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, serta berkomitmen untuk bertindak demi kebaikan umum. Dengan menjadi representatif yang baik bagi rakyat, mereka dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi politik mereka.

Peran masyarakat dalam penguatan etika politik

Peranan masyarakat tidak kalah penting dari beberapa peranan karena hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dari peran masyarakat dalam demokrasi adalah partisipasinya dalam pemilu. Masyarakat sering terlibat dalam kegiatan untuk mempromosikan partisipasi politik dan pendidikan pemilih. Mereka memainkan peran penting dalam memobilisasi warga untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dan membuat pilihan berdasarkan informasi selama pemilihan. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat terdengar dalam pemilihan pemimpin mereka.¹

Selanjutnya, Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengkritisi praktek politik yang tidak bermoral atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan memiliki kesadaran politik yang tinggi, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menuntut praktek politik yang lebih baik.¹² Masyarakat juga dapat berperan dalam membentuk opini publik terhadap politik Islam dengan cara mendukung dan memilih para pemimpin yang memiliki reputasi baik dalam hal etika politik. Dengan memberikan dukungan kepada para pemimpin yang bermoral, masyarakat secara tidak langsung memberikan sinyal kepada para politisi bahwa praktek politik yang bermoral adalah prasyarat untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.¹ Sehingga masyarakat menjadi agen perubahan paling arif karena mampu melihat situasi dan kondisi yang terjadi dikalangan masyarakat karena masyarakat mampu melihat kondisi-kondisi kecil apa yang terjadi di masyarakat dan menjadi bahan kritisi bagi pembawa perubahan yaitu pemimpin politik.

¹⁰ Bertolomes Bolong, "Etika Politik Ulama," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 1 (2018): 129–52, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art7>.

¹¹ Maulana Yusuf et al., "Etika Islam dalam ranah politik": Respon Dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005-2015," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (2017): 139–54, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.h.306>.

¹² Sri Lestari Wahyuningroem, "Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan Dan Penguatan Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Bali Dan Maluku," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 2 (2021): 236–51, <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251>.

Pengawasan dan penegakkan hukum

Lembaga pengawas dan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menindak praktek politik dalam pemilu, yang korup atau tidak bermoral. Untuk meningkatkan pemantauan independent yaitu untuk memastikan penegakan hukum berjalan efisien dan transparan, organisasi pengawas seperti Bawaslu perlu diperkuat.¹³

Semua pemain politik, termasuk mereka yang terlibat dalam taktik tidak adil atau pelanggaran peraturan, harus dikenakan tuntutan hukum yang ketat dan tidak diskriminatif terhadap pelanggaran. Jika KPU, Bawaslu, kepolisian, dan organisasi terkait lainnya serius dalam menegakkan undang-undang dan meningkatkan pengawasan, maka mereka harus bekerja sama secara erat. Menginspirasi para pemilih dan pemimpin masa depan untuk mengadopsi budaya politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan tingkat literasi politik yang tinggi untuk menghasilkan pemimpin yang bermoral dan dapat dipercaya.¹ Dengan menegakkan hukum secara adil dan transparan, lembaga-lembaga ini dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan berintegritas.¹⁴ Yang menjadikan hal tersebut tidak menjadi kekeliruan dikalangan pelaksana yaitu pemimpin dan membuat masyarakat sekitar tidak canggung karena adanya transparansi pada ranah pemilihan.

Implikasi Penguatan Etika Politik Islam di Indonesia

Implikasi dari penguatan etika politik Islam adalah terciptanya lingkungan politik yang lebih bersih dan berintegritas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap para pemimpin dan lembaga politik, serta mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya kolektif dari para pemimpin politik, partai politik, masyarakat, dan ulama.¹ Pemimpin politik harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip etika politik dalam setiap aspek kegiatan politik mereka. Partai politik harus mengintegrasikan nilai-nilai etika politik dalam program dan kegiatan mereka.¹⁵ Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin politik. Mereka harus mengedepankan kriteria moral dan etika berdasar pada nilai-nilai Islam dalam menilai kinerja para pemimpin mereka, bukan hanya berdasarkan pada keberhasilan politik atau keberhasilan ekonomi semata.¹

SIMPULAN

Indonesia termasuk negara populasi muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2020, sekitar 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan dalam penguatan etika politik Islam memiliki potensi besar untuk membentuk sistem politik yang lebih baik bagi politik dan masyarakat di Indonesia hal

inilah yang menjadikan agama sebagai dasar dari esensi etika dalam politik Islam. Penguatan etika politik Islam merujuk pada upaya meningkatkan penerapan nilai-nilai moral Islam dalam praktek politik. Meskipun politik Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan besar sejak kemerdekaan, negara ini juga terlibat dalam perselisihan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan etika politik Islam sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip moralitas dan keadilan Islam dan membutuhkan beberapa peranan diberbagai kalangan seperti peran lembaga politik Islam, peran tokoh politik Islam, peran masyarakat, serta pengawasan dan penegakkan hukum. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji dampak etika politik Islam terhadap kebijakan public di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa fokus pada evaluasi implementasi etika politik Islam di berbagai daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Abdillah, Masykuri. "HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM KONTEKS MODERNISASI POLITIK DI ERA REFORMASI." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 247–58. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/937/823>.
- Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif

¹³ Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204, <https://bit.ly/2FhMAKf>.

¹⁴ Charlie Lumenta, "Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014): 125–32.

¹⁵ Zaedun Na'im, "Etika Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Korelasinya Terhadap Kinerja," *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 195–210, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.972>.

- Fikih Siyasa 1Akhmad.” *Jurnal Syntax Idea* 6, no. 100 (2024): 52.
- Alim, Ashari Sakti, Salmawati Salmawati, and Dian Eka Rahmawati. “Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang).” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2021): 30. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1392>.
- Bolong, Bertolomes. “Etika Politik Ulama.” *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 1 (2018): 129–52. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art7>.
- Dahlan, Dewi. “Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif).” *Menara Ilmu* 15, no. 1 (2021): 42–50. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>.
- Darmila, Linda, Julia Ivanna, and Muhammad Iqbal. “Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 8, no. 2 (2019): 59–71. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2606>.
- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono. “Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi.” *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018): 363. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>.
- Dwihantoro, Prihatin. “ETIKA DAN KEJUJURAN DALAM BERPOLITIK Prihatin Dwihantoro.” *Politika* 4, no. 2 (2013): 13–21.
- Farhah, Achmad farid. “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam.” *Jurnal Dauliyah* 4 (2019): 32.
- Hartini, Dwi. “Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah.” *Asketik* 3, no. 1 (2019): 47–59. <https://doi.org/10.30762/ask.v3i1.1157>.
- IN’AMUZZAHIDIN, MUH., Ikrima Amira Ahadiya, Iain Sultan, Amal Gorontalo, and Andi Adam Virgiawan. “Etika Politik Dalam Islam.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2012): 34–55. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>.
- Isrofiah Laela Khasanah, Paryanto. “Symbiosis Harmoni: Islam Dan Politik Dalam Masyarakat Kontemporer.” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21 (2018): 86–101.
- Jufri, Andi. “Masyarakat Madani Dan Penguatan Demokrasi Politik Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah AL-Jaubari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 285–307. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385>.
- Kadir, Muntasir Abdul. “Eksistensi Ulama Dalam Politik Islam.” *AL-IJTIMA’I-International Journal of Government and Social Science* 2, no. 1 (2017): 55–56. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/2615%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/60566/.
- Lumenta, Charlie. “Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014): 125–32.
- Malik, Adam, Abdur Rahim, and Taufiqurachman Taufiqurachman. “Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun Dalam Implementasinya Di Indonesia.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 3599–3610. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>.
- Maloko, M Thahir. “Etika Politik Dalam Islam.” *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 50–59.
- Mannuhung, Suparman, and Andi Mattingaragau Tenrigau. “Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik.” *Jurnal Pendidikan* 1 (2018): 27–35.
- Mundakir, Akhmad. “Peran Masyarakat Sipil Dalam Penguatan Demokrasi Politik Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 3 (2023): 61–77. <https://doi.org/10.21043/cdipmi>.
- Na’im, Zaedun. “Etika Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Korelasinya Terhadap Kinerja.” *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 195–210. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.972>.
- Nurdiarti, Rosalia, and Muhammad Nastain. “Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRD Dalam Implementasi Kebijakan Publik.” *ETTISAL: Journal of Communication* 6, no. 1 (2021): 99. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.5070>.
- Putri, Maria, Ariantingsi Lase, Muhamad Ghaza, Nathifa Putri, Yasmine Novi, and Anya Yuli. “Perilaku Yang Buruk Dalam Etika Berpolitik (Gratifikasi).” *Administrasi Publik: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, no. June (2023).
- Rasyid, Fauzan A L I. “Politik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia.” *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 9, no. 2 (2008): 75–86.
- Rिताudin, M. Sidi. “Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis Dan Rasional Politik Bangsa.” *Jurnal TAPIS* 10, no. 2 (2014): 12–32.
- Rohmah, Wardatur. “Ulama Dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur’an.” *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2020): 179–200. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3829>.

- Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>.
- Sucahyo, Imam. "Penguatan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Etika Politik (Studi Pada Perwakilan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Mahasiswa Dan Karang Taruna Kabupaten Dan Kota Probolinggo)." *Jurnal Abdi Panca Mara* 2, no. 1 (2021): 8–16. <https://doi.org/10.51747/abdipancamara.v2i1.725>.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. "Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan Dan Penguatan Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Bali Dan Maluku." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 2 (2021): 236–51. <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251>.
- Yuniarto, Bambang, and Winarno Narmoatmojo. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Pendidikan Politik." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2 (2021): 1–30.
- Yusuf, Maulana, Bahrul Ulum, M. Rusydi, and M. Ishak. "ETIKA ISLAM DALAM RANAH POLITIK: Respon Dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005-2015." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (2017): 139–54. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.306>.